

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

Oleh:

NURSELLA^{1*}

NIM : E1011151143

Sri Haryaningsih² , Hairil Anwar²

*Email: nursellaian2015@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan kartu identitas penduduk musiman (KIPEM) yang belum optimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ada penduduk musiman di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak belum membuat KIPEM. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan KIPEM di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah: 1) Komunikasi, dinilai masih kurang karena masih terdapat ketidakjelasan terkait informasi tentang KIPEM; b) Sumber Daya, dinilai belum optimal karena masih ada yang kurang memadai; c) Disposisi, dinilai masih rendah dan kurang responsif; d) Struktur Birokrasi, dinilai masih rumit dan birokratis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan KIPEM di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak masih kurang efektif. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah daerah Kota Pontianak agar lebih meningkatkan komunikasi yang jelas, meningkatkan sumber daya terkait staf, fasilitas dan dana yang dibutuhkan, memperbanyak pembinaan dan sosialisasi dalam kebijakan KIPEM, dan struktur birokrasi yang lebih baik koordinasinya dari daerah asal dan daerah yang akan didatangi.

Kata kunci : Implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

WORK EFFECTIVENESS OF EMPLOYEES IN MAKING BIRTH CERTIFICATE IN SEKADAU REGENCY POPULATION AND CIVIL REGISTRY OFFICE

By:

NURSELLA^{1*}

NIM : E1011151143

Dra. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si², Hairil Anwar, SE, M.Si²

*Email: nursellaian2015@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the factors that influence the work effectiveness of employees in making birth certificates in Sekadau Regency Population and Civil Registry Office. This research is based on the problem of the ineffective work of employees in making birth certificates for the community. The research method used is qualitative approach with exploratory research type. This study uses the theory of factors that affect work effectiveness according to Richard M. Steers (in Umam 2012: 351) which consists of 1) Organizational Characteristics. The placement of employees is not appropriate to the educational qualifications of employees and the number of employees is not balanced with the existing workload; 2) Environmental Characteristics. There is a communication process with other government agencies, but the communication process with the community is not sufficient because there are still many people who do not understand the procedure for making a birth certificate and the work space is narrow and not properly organized which reduces employee morale; 3) Worker Characteristics. The interest of employee in working is not adequate since there is no reward that can increase employee motivation and the attitude of employees who are less disciplined in working also hinders the provision of the birth certificate services for the community; 4) Characteristics of Management Policies and Practices. The efforts to increase ownership of birth certificates are implemented through innovative proactive birth certificate service, but this is not utilized properly by the community. In this research, it is suggested that to manage HR (human resources) management, personnel needs to be added in order to balance the workload, workspace facilities need to be improved for comfortable working environment, reward and punishment system needs to be implemented in order to deal with undisciplined employees, and the proactive program needs to be implemented once a week.

Keywords: Work Effectiveness, Employee.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan kartu identitas penduduk musiman sebelumnya tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 tahun 2004 yaitu tentang pemberian kartu identitas penduduk bagi penduduk musiman yang sekarang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Secara rinci pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman yang disingkat KIPEM tersebut tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 BAB III pasal 19 yang menegaskan bahwa setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah Kota Pontianak selama 14 (empat belas hari) berturut-turut wajib memiliki KIPEM.

Kota Pontianak masih terdapat penduduk musiman yang tidak memiliki KIPEM bukan hanya itu tidak sedikit juga jumlah mereka yang tidak mengenal atau belum mengetahui apa itu KIPEM, apa

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika> fungsi dan manfaatnya juga belum tahu. Hal demikian sangat disayangkan ketika program yang telah dibuat sedemikian rupa akan tetapi banyak kalangan masyarakat yang belum mendapat informasi tentang apa KIPEM tersebut. Melihat manfaatnya yang cukup berpengaruh untuk membantu memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang ada saat ini serta untuk membantu menjaga kenyamanan Kota Pontianak ini dari bahaya penduduk yang datang misalnya seperti teroris dan pelaku kejahatan lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan khususnya dalam menerbitkan KIPEM di Kota Pontianak yaitu mensosialisasikan kebijakan tentang KIPEM bahwa penduduk musiman, baik masyarakat umum maupun mahasiswa wajib membuat KIPEM. Tetapi dalam kenyataannya dari hasil razia masih terdapat

penduduk pendatang tidak mempunyai KIPEM. Camat Pontianak Tenggara di dampingi personel TNI/Polri Titin Subakti saat merazia di Kelurahan Bangka Belitung Darat mengungkapkan, dari tiga rumah kost yang dirazia, masih ditemukan penduduk pendatang yang sudah melewati batas waktu untuk melapor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bangka Belitung Darat Pontianak Tenggara Kota Pontianak”.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Masih terdapat penduduk musiman yang berada di Kelurahan Bangka Belitung Darat belum membuat KIPEM.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap penduduk musiman.

3. Kurangnya pengawasan terhadap penduduk musiman tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

3. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian ini diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang belum berjalan dengan optimal.

4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bangka Belitung Darat belum berjalan dengan optimal

5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) yang belum optimal di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta dapat memberi sumbangan pada perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya berkaitan dengan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik oleh organisasi implementor kebijakan KIPEM di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

R. Dye dalam Pasolong (2014:39), merupakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Kraft dan Furlog (dalam Nugroho, 2015:105): “Kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain”.

2. Teori

a. Komunikasi

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan ini mungkin menghalangi kebijakan.

b. Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksanaan kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika>
penting meliputi: staf yang memadai serta

keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c. Kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Mengingat pentingnya kecenderungan-kecenderungan ini bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka perlu di sini dibahas dampak dari

kecenderungan-kecenderungan tersebut terhadap implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edward adalah dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori

Judul

Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

Masalah Penelitian

- Masih terdapat penduduk musiman yang berada di Kelurahan Bangka Belitung Darat belum membuat KIPEM.
- Kurangnya sosialisasi terhadap penduduk musiman.
- Kurangnya pengawasan terhadap penduduk musiman tentang Kartu Identitas Penduduk

Teori

Teori yang digunakan adalah menurut GeorgeEdward III (dalam Winarno, 2007: 174-203):

- Komunikasi
- Sumber Daya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi

Output

Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian, baik yang berupa orang, lembaga dan masyarakat sebagaimana adanya (Nawawi: 2001:3) penentuan jenis penelitian ini berangkat pada pendapat Bodgan dan Taylor (Moleong, 2007:3), yaitu mengidentifikasi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mengungkapkan data dan fakta secara apa adanya dari kenyataan yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah di Kelurahan Bangka Belitung Darat Pontianak Tenggara seperti pada rumah kos/kontrakan yang umumnya menjadi tempat tinggal sebagian besar penduduk musiman.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 hingga Januari 2021.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

Subyek penelitian ini adalah orang-orang tertentu yang secara sengaja dipilih sebagai sumber informan untuk mendapatkan data-data mengenai masalah yang diangkat dan diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Kepala Seleksi Pindah Datang Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
2. Kasi Pemerintahan Bangka Belitung Darat
3. Ketua RT
4. Pemilik Kost
5. Penduduk pendatang di Kota Pontianak yang memiliki KIPEM
6. Penduduk Pendatang yang belum memiliki KIPEM berada di Kelurahan Bangka Belitung Darat

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan klasifikasi, verifikasi, interpretasi data, dianalisis sampai pada pembahasan hingga diperoleh kesimpulan atas jawaban – jawaban dari informan berdasarkan

panduan wawancara. Sesungguhnya analisis suatu data telah berlangsung sejak proses pertama kali dilakukan, setiap informan yang akan dijadikan materi penulisan harus melalui suatu proses pertimbangan dan didalamnya sudah mengandung aktivitas analisis. Analisis data mencakup penafsiran semua informasi yang dikumpulkan, mengatur hasil – hasil penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Data yang telah benar - benar sah (*valid*), maka dilakukan pemeriksaan dengan dua teknik, sebagai berikut:

1. Pertama, teknik triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan penelitian atau sebagai bahan perbandingan

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika> terhadap data itu, biasa berupa penggunaan nara sumber, metode, peneliti dan teori.

2. Kedua, perbincangan dengan peneliti lain atau para ahli dibidangnya tentang topik atau hasil penelitian yang penulis peroleh, sehingga mendapatkan masukan dalam melakukan analisa.

D. HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Faktor komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui tentang apa yang akan mereka laksanakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka laksanakan dapat berjalan apabila ada komunikasi. Sementara itu, ada banyak hal mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa saat ini KIPEM mendapatkan pembaharuan, yakni penduduk non-permanen yang diatur dalam Permendagri No.14 Tahun 2015 tentang Penduduk Non-Permanen. Saat dilaksanakannya Permendagri No. 14 Tahun 2015 ini bentuknya selembarnya dan penyebutannya sudah Penduduk Non-Permanen, bukan lagi dalam bentuk kartu berwarna kuning seperti sebelumnya.

Komunikasi yang dilakukan terkait kebijakan KIPEM belum ditransmisikan secara optimal dari implementor dan menyebabkan ketidakjelasan serta kurangnya informasi yang diperoleh dari implementor kepada penduduk pendatang. Kelemahan dalam mentransmisikan kebijakan KIPEM adalah belum dapat menjangkau ke seluruh penduduk pendatang, sehingga banyak yang tidak mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan KIPEM karena manfaat dari KIPEM kurang dengan adanya E-KTP yang berlaku secara nasional yang bisa digunakan dimana saja dan mengurus kebutuhan penduduk musiman tanpa harus adanya KIPEM. Sementara yang mengetahui kebijakan KIPEM tetapi enggan untuk membuat KIPEM karena kebijakan tidak

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika> disosialisasikan dengan jelas dan menyeluruh.

2.Sumber Daya

Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. hasil penelitian dapat disimpulkan, mengenai sumber-sumber daya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KIPEM menunjukkan bahwa minimnya sumber-sumber daya baik staff (pegawai), informasi, wewenang, fasilitas maupun dana yang menyebabkan implementasi kebijakan KIPEM tidak berjalan efektif. Staff atau SDM yang kurang memadai, dalam arti bahwa SDM yang ada tidak benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang

kebijakan KIPEM. Oleh karena SDM yang belum melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, akhirnya informasi yang diterima pun tidak akurat dan membuat para pelaksana ditingkat atas kesulitan untuk memperoleh informasi yang valid. Kemudian, untuk sumber informasi belum ada pegawai khusus yang mengelola sehingga informasi terkait jumlah penduduk pendatang berasal dari laporan penduduk pendatang yang melapor ke RT atau Kelurahan tentang keberadaannya di Kota Pontianak. Dalam hal wewenang juga, masih tergolong lemah, terbukti dengan respon yang kurang tanggap dari RT setempat dalam mendata penduduk yang datang, dan juga belum terdapat sanksi tegas dari Lurah atau DISDUKCAPIL untuk RT yang pasif dalam implementasi kebijakan KIPEM ini. Terakhir yakni mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan KIPEM, bahwa masih ada beberapa fasilitas yang kurang memadai

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika> seperti komputer khusus untuk menyimpan

data khusus penduduk yang datang dan penduduk yang memiliki KIPEM, agar terlihat sistematis dan teratur.

3. Kecenderungan atau disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

disposisi (sikap pelaksana) dinilai masih rendah dan berdampak terhadap implementasi kebijakan KIPEM. Hal ini terlihat pada seberapa jauh para pelaksana menerima, memahami dan dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikannya, sehingga implementasi kebijakan KIPEM tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. permasalahan penting yang menyebabkan rendahnya komitmen implementor dalam melaksanakan kegiatan KIPEM dipengaruhi oleh minimnya dukungan sumber daya terutama pendanaan untuk memberikan rangsangan kepada

pelaksana agar melaksanakan kewajiban dalam kebijakan KIPEM dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Minimnya dukungan pendanaan kepada implementor kebijakan yang berdampak terhadap komitmen mereka dalam melaksanakan tugas, tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak yang terlihat pasif dalam melaksanakan kebijakan KIPEM ini. Artinya jika mereka ingin kebijakan ini efektif, maka implementor perlu ditunjang dengan sumber daya yang memadai agar mereka memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan KIPEM.

4. Kecenderungan atau disposisi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya standar operasional prosedur (SOP). Dan

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika> selanjutnya adalah fragmentasi yaitu penyebaran aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas petugas diantara beberapa unit kerja.

faktor struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan KIPEM belum terlaksanakan dengan baik, dikarenakan kebijakan ini terlalu rumit dalam SOP-nya, serta harus melibatkan beberapa instansi dalam pengurusannya. Hal ini bertolak belakang dengan penjelasan pada sosialisasi yang mengatakan bahwa pembuatan KIPEM tidak sulit. Dalam hal ini terlihat bahwa kebijakan KIPEM, ditambah dengan minimnya komitmen dan motivasi implementor untuk melakukan sistem jemput bola, yaitu mendatangi penduduk pendatang dengan melakukan sosialisasi, serta mempermudah persyaratan dan prosedur pembuatan KIPEM dinilai masih belum optimal. Kendati demikian, hal ini juga tentu sulit apabila tidak ada dukungan dana yang optimal dari

pemerintah pusat. Kemudian dalam hal pemenuhan persyaratan pembuatan KIPEM yakni tentang KK penampung dinilai menyulitkan penduduk musiman, karena tidak semua tempat tinggal penduduk yang datang terdapat KK penampung.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan kondisi yang didapatkan peneliti dilapangan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Sementara (Kipem) Di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun simpulan tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

saat ini KIPEM mendapat pembaharuan, yakni penduduk non-permanen yang diatur dalam Permendagri No. 14 Tahun 2015 tentang Penduduk Non-Permanen. Komunikasi yang dilakukan terkait kebijakan KIPEM belum ditransmisikan secara optimal dari implementor dan menyebabkan ketidak

PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika> jelasan serta kurangnya informasi yang diperoleh dari implementor kepada penduduk pendatang. Kelemahan dalam mentransmisikan kebijakan KIPEM adalah tidak dapat menjangkau keseluruhan penduduk pendatang, sehingga banyak yang tidak mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan KIPEM. Sementara yang mengetahui kebijakan KIPEM tetapi enggan untuk membuat KIPEM karena kebijakan tidak disosialisasikan dengan jelas dan menyeluruh. Selain itu, terdapat penduduk musiman yang menilai manfaat dari KIPEM kurang dengan adanya E-KTP yang berlaku secara nasional.

Oleh sebab itu, dalam pemberian pemahaman tentang kebijakan KIPEM dari implementor harus jelas dan konsisten, agar tidak terjadi kesalahan oleh masyarakat dalam melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan KIPEM.

2.Sumber Daya

mengenai sumber-sumber daya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KIPEM menunjukkan bahwa minimnya sumber-sumber daya baik staff (pegawai), informasi, wewenang, fasilitas maupun dana yang menyebabkan implementasi kebijakan KIPEM tidak

berjalan efektif. Staff atau SDM yang kurang memadai, dalam arti bahwa SDM yang ada tidak benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya, akhirnya informasi yang diterima pun tidak akurat dan membuat para pelaksana ditingkat atas kesulitan untuk memperoleh informasi yang valid. Kemudian, untuk sumber informasi terkait jumlah penduduk pendatang berasal dari laporan penduduk pendatang yang melapor ke RT atau ke Kelurahan tentang keberadaannya di Kota Pontianak. Dalam hal wewenang juga, masih tergolong lemah, terbukti dengan respon yang kurang tanggap dari RT setempat dalam mendata penduduk yang datang, dan juga belum terdapat sanksi tegas dari Lurah atau DISDUKCAPIL untuk RT yang pasif dalam implementasi kebijakan KIPEM ini. Terakhir, fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan KIPEM, bahwa masih ada beberapa fasilitas yang kurang memadai seperti komputer khusus untuk menyimpan data khusus penduduk yang datang dan penduduk yang memiliki KIPEM agar terlihat sistematis dan teratur.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi

disposisi (sikap pelaksana) dinilai masih rendah dan berdampak terhadap

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika> implementasi kebijakan KIPEM. Hal ini terlihat pada seberapa jauh para pelaksana menerima, memahami dan dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikannya, sehingga implementasi kebijakan KIPEM tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian, sikap cepat tanggap dari implementor dinilai masih rendah, sehingga banyak penduduk yang datang tidak masuk dalam data kependudukan.

4. Struktur birokrasi

SOP yang dibuat sebagai syarat untuk membuat KIPEM dinilai masih cukup rumit dan birokratis, karena harus mendapatkan surat keterangan KK penampung, sementara tidak semua tempat tinggal penduduk pendatang terdapat KK penampung, selain itu prosedur untuk membuatnya cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Dari aspek koordinasi, belum terdapat mekanisme koordinasi yang baik antara DISDUKCAPIL, Lurah dan RT untuk bersinergi agar pembuatan KIPEM dapat dipercepat dan mudah.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis memberikan beberapa saran untuk membuat implementasi kebijakan

KIPEM ini dapat dinilai efektif dan efisien, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pemahaman yang disampaikan dengan cara sosialisasi yang dilakukan baik itu dari DISDUKCAPIL, Lurah maupun RT harus lebih aktif.
2. Perlunya perekrutan pegawai baru pada bagian pemberian pelayanan di loket pelayanan administrasi kependudukan, agar efektif waktu dan tenaga.
3. diperlukannya pengawasan yang lebih detail lagi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan kepada Lurah dan RT agar melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kebijakan KIPEM dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.
4. struktur birokrasi dalam kebijakan KIPEM perlu dilakukannya penyederhanaan dalam persyaratan pembuatan KIPEM dan penataan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan KIPEM, contohnya dengan menyelenggarakan sistem online dalam hal pembuatan KIPEM. Koordinasi antara lembaga/instansi yang terlibat dalam kebijakan KIPEM,

PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika>
DISDUKCAPIL, Lurah ataupun RT perlu dilakukannya pembenahan sosialisasi untuk meningkatkan koordinasi ketiga instansi tersebut, agar baik dari DISDUKCAPIL maupun Lurah dapat memperoleh data yang akurat dari RT dan juga untuk meningkatkan kesadaran dari penduduk pendatang untuk membuat KIPEM. Perlu ditambahkan aturan tentang penduduk pendatang meminta surat keterangan dari daerah asal bahwa akan datang ke Pontianak, sehingga nantinya kepengurusan tentang KIPEM ini bisa langsung diurus di RT atau Lurah atau DISDUKCAPIL di Kota Pontianak.

E. REFERENSI

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, j. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Deddy. 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

- Syaffie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Tim Dosen Fisip. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UNTAN*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura : Pontianak.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber Internet :

(<https://www.google.com/url?sa=t&source=j&url=https://pontianak.tribunnews.com/tag/bangka-belitung-darat>).

Dokumen Lain:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kartu Identitas Penduduk Bagi Penduduk Musiman Di Kota Pontianak.

- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Referensi Jurnal Skripsi :

- Resna Januarti tahun 2017, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman Di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak

PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika>

- Kota.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura”.
- Rahel tahun 2013, yang berjudul “Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman Di Kelurahan Bansir Darat kecamatan Pontianak Tenggara”.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak”.